BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang dilakukan menggunakan uji regresi linier berganda, uji t, dan uji F, diperoleh kesimpulan bahwa seluruh variabel independen dalam penelitian ini, yaitu pemahaman pajak (X1), modernisasi sistem administrasi pajak (X2), dan sanksi pajak (X3), secara parsial maupun simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) di wilayah kerja KPP Pratama Cirebon Satu.

1. Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel pemahaman pajak memiliki nilai t-hitung sebesar 3,323 dan signifikansi 0,0013, lebih besar dari t-tabel (1,985) dan lebih kecil dari 0,05. Ini membuktikan bahwa pemahaman pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Secara teoritis, pemahaman yang baik dapat meningkatkan sikap positif terhadap kepatuhan, sesuai dengan Theory of Planned Behavior (TPB) dan Attribution Theory.
2. Variabel modernisasi sistem administrasi pajak memiliki nilai t-hitung sebesar 2,362 dan signifikansi 0,020, menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan. Modernisasi menciptakan kemudahan akses, efisiensi, dan persepsi kemudahan penggunaan sistem pajak, yang sesuai dengan pendekatan Technology Acceptance Model (TAM) dan diperkuat dengan perceived behavioral control dalam Theory of Planned Behavior (TPB).
3. Sanksi pajak memiliki nilai t-hitung sebesar 3,365 dan signifikansi 0,001, sehingga berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Keberadaan sanksi menciptakan tekanan normatif dan rasa tanggung jawab, sebagaimana dijelaskan dalam Compliance Theory dan Theory of Planned Behavior (TPB).

4. Hasil uji F menunjukkan bahwa nilai F-hitung sebesar 35,778 lebih besar dari F-tabel (2,70) dengan signifikansi 0,000000, yang menunjukkan bahwa ketiga variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan ini memperkuat bahwa pendekatan integratif antara edukasi, teknologi, dan penegakan hukum merupakan strategi efektif untuk mendorong kepatuhan yang berkelanjutan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemahaman pajak, modernisasi sistem administrasi, dan sanksi pajak memiliki peran yang saling melengkapi dalam membentuk perilaku patuh wajib pajak orang pribadi, baik secara individual maupun kolektif. .

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan keterbatasan yang ada, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Direktorat Jenderal Pajak, disarankan untuk terus meningkatkan program edukasi dan penyuluhan kepada wajib pajak guna memperkuat pemahaman mereka terkait hak dan kewajiban perpajakan. Selain itu, modernisasi sistem administrasi perlu terus ditingkatkan, khususnya dalam hal kemudahan akses, integrasi sistem, dan responsif terhadap kebutuhan pengguna.
2. Bagi wajib pajak, diharapkan dapat memanfaatkan fasilitas digital yang disediakan oleh DJP secara optimal, serta aktif mencari informasi guna meningkatkan literasi perpajakan sebagai bagian dari kontribusi terhadap pembangunan negara.
3. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menambahkan variabel lain yang relevan, memperluas cakupan wilayah penelitian, serta menggunakan pendekatan longitudinal agar dapat menangkap perubahan perilaku kepatuhan wajib pajak secara lebih dinamis